

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul

Kontroversi Pemberitaan Aksi #2019gantipresiden
(Analisis Framing Pemberitaan Aksi #2019gantipresiden pada SKH Suara Merdeka, SKH
Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika)

Oleh

Rudi Siswanto

20130530316



Yang Disetujui,

Dosen Pembimbing

Fajar Junaedi, S.Sos, M.Si

KONTROVERSI PEMBERITAAN AKSI #2019GANTIPRESIDEN

(Analisis Framing Pemberitaan Aksi #2019gantipresiden pada SKH Suara Merdeka, SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika)

CONTROVERION OF INFORMATION ON ACTION #2019GANTIPRESIDEN

(Framing Analysis of Information on Action #2019gantipresiden on Daily Newspaper Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat and Republika)

Rudi Siswanto¹, Fajar Junaedi²

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya Kasihan Tamantirto
Bantul Yogyakarta

² Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya Kasihan Tamantirto
Bantul Yogyakarta

Alamat Email : rudistumtaiker@gmail.com, fajarjun@umy.ac.id

ABSTRAK

Menjelang pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada April 2019 banyak terjadi ketegangan politik baik diantara para calon presiden maupun para pendukungnya. Salah satu ketegangan yang terjadi adalah adanya kontroversi gerakan #2019gantipresiden yang akhir-akhir ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Gerakan #2019gantipresiden sendiri merupakan sebuah gerakan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden yaitu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, akan tetapi dalam pergerakannya sering sekali mendapatkan penolakan-penolakan baik dari masyarakat maupun pendukung calon presiden lain yang akhirnya timbul konflik yang tidak bisa dihindari. Dalam beberapa waktu terakhir hal tersebut menjadi bahan pemberitaan di beberapa media cetak, baik itu nasional maupun lokal, seperti pada surat kabar Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika. Dalam hal ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bingkai pemberitaan surat kabar Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika, dimana data yang digunakan oleh peneliti adalah berita terkait kontroversi gerakan #2019gantipresiden pada surat kabar Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika pada edisi 6 – 8 September 2018 yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisi model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menghasilkan persamaan bahwa bingkai pemberitaan surat kabar Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika. Sudut pandang yang digunakan oleh ketiga surat kabar tersebut seakan tidak memihak terhadap gerakan #2019gantipresiden, terlihat dengan dengan bagaimana ketiganya

memberikan pemberitaan-pemberitaan yang cenderung kontra terhadap gerakan #2019gantipresiden.

Kata Kunci: Realitas Media, Berita, *Framing*

ABSTRACT

Ahead of the presidential election, which will be held in April 2019 there is a lot of political tension between the presidential candidates and their supporters. One of the tensions that occurred was the movement of controversy #2019Gantipresiden which lately has caused prolonged conflict. Movement of #2019gantipresiden is a movement to support one of the presidential candidate pairs, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, but in his movements often get rejections from both the community and supporters of other presidential candidates who eventually arise conflicts that cannot be avoided. In recent times, this has become a news item in several national and local print media, like Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika. In this case, the researcher has the aim to find out how the news coverage of Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat and Republika, where the data used by researchers is news related to the controversy of movement of #2019Gantipresiden on the Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika in the 6-8 September edition of 2018 which were collected by documentation technique, then analyzed using technical analysis model Zhondang Pan and Gerald M. Kosicki. This research resulted in the equation that the news coverage of Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat and Republika newspapers. The viewpoint used by the three newspapers seemed impartial to the #2019Gantipresiden movement, seen by how the three provide reports that tend to be counter to the #2019Gantipresiden movement.

Keywords: *Media Reality, News, Framing*

PENDAHULUAN

Media massa menjadi sarana yang sangat penting untuk masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi, Informasi yang disajikan oleh media pun sangat beragam baik yang bersifat hiburan sampai politik. Media massa dapat dilihat sebagai sistem sosio-teknik yang secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan “sosio” dan “teknik” di sini dimaksudkan untuk merujuk tentang adanya saling ketergantungan antara aspek teknologis dan aspek sosial (Hikmat dan Purnama, 2016:295). Setiap informasi yang diberikan media kepada masyarakat, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Media memiliki kekuatan yang

besar untuk membentuk persepsi kita mengenai dunia sosial kita dan untuk menggerakkan tindakan kita, sering kali hal tersebut terjadi tanpa diikuti kesadaran kita. Teori ini beranggapan bahwa pengaruh media perlu dikontrol. Akan tetapi, strategi kontrol tersebut sangat beragam, sebanyak teoritikus yang menawarkan (Baran dan Davis, 2014:57-58). Secara garis besar media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sebuah realitas yang terjadi, peran media di sini adalah sebagai sarana atau wadah untuk bagaimana sebuah realitas yang telah dibangun itu disampaikan dengan baik kepada masyarakat yang pastinya realitas itu sarat akan muatan kepentingan tertentu. Realitas sosial memiliki makna, manakala realitas dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya (Bungin, 2008:12-13).

Informasi yang mulai berkembang membuat media berperan penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat, hal tersebut menjadikan berita yang ingin diketahui, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat menjadi sangat penting, karena kebanyakan berita berisi tentang seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi dan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Berita lebih mudah diketahui daripada didefinisikan. Tanyakan kepada seorang wartawan senior apa berita itu, maka ia akan menemukan kesulitan untuk menjelaskannya. Tetapi mintalah ia merisalahkan berita-berita peristiwa terpenting yang terjadi dalam sehari kemarin, maka ia tanpa ragu-ragu akan membuka halaman depan surat kabar hari ini dan menunjuk judul *headline*-nya kemudian menunjuk judul-judul berita lainnya dalam urutan mulai dari yang kurang penting dibandingkan dengan berita *headline* sampai ke berita-berita yang kurang penting lagi (Hikmat dan Purnama, 2016:31). Berita adalah *mirror of reality*, karenanya ia harus mencerminkan realitas

yang hendak diberitakan. Pandangan ini ditolak oleh kaum konstruksionis. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dan berita tidak dianggap salah, tetapi sebagai suatu kewajaran (Eriyanto, 2012:29). Dalam proses pembentukan suatu berita peran wartawan sangat dibutuhkan di dalamnya, wartawan di sini berperan sebagai pelapor. Sebagai pelapor, ia hanya menjalankan tugas untuk memberitakan fakta, dan tidak diperkenankan munculnya pertimbangan moral atau nilai tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat membelokan wartawan apapun alasannya menjauhi realitas yang sesungguhnya (Eriyanto, 2001:40).

Bagi redaksi surat kabar, makin banyak kegunaan suatu berita, makin tinggi nilai beritanya. Sebaliknya makin sedikit kegunaan suatu berita bagi seseorang, makin rendah nilai berita itu baginya. Nilai suatu berita ditentukan oleh jumlah pembaca yang kepentingannya terpenuhi oleh berita tersebut (Wazis, 2012:34). Industri surat kabar berdasarkan sejarah juga memainkan peran penting dalam mendefinisikan konsep budaya dari pers independen, didasarkan keyakinan bahwa pers harus tetap independen dari kontrol pemerintah demi memenuhi tanggung jawabnya dalam menginformasikan kepada masyarakat (Biagi, 2010:65).

Menjelang pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali yaitu Pemilihan Presiden yang nantinya akan diselenggarakan pada April 2019, banyak sekali ketegangan politik yang terjadi di dalamnya. Dari terpilihnya kandidat masing-masing calon presiden yaitu Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menjadi sorotan banyak media

sekarang ini, dan bagaimana kelakuan dari para pendukung masing-masing calon presiden yang juga menjadi topik pembahasan dibanyak media. Ketegangan politik antar pendukung masing-masing calon presiden seakan tidak bisa terelakan menjelang pemilihan presiden mendatang, aksi dukungan dari para pendukung bertujuan untuk bagaimana calon yang mereka dukung mendapatkan suara dari masyarakat sebanyak-banyaknya, terkadang berbagai cara mereka lakukan untuk bagaimana tujuan mereka tercapai yang pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat itu sendiri, selain itu penolakan atas cara dukungan yang dianggap kurang pantas muncul dari kalangan pendukung pihak lawan yang akhirnya konflik politik antar pendukung tidak bisa dihindarkan, keharmonisan antar pendukung masing-masing calon presiden seakan tidak diindahkan oleh masing-masing pendukung calon presiden menjelang pemilihan presiden mendatang. Salah satu bentuk aksi dari dukungan yang sering mendapatkan aksi pro dan kontra dari kalangan masyarakat maupun kalangan pendukung lawan sampai saat ini adalah aksi #2019gantipresiden.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis *framing*. Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut di konstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna (Eriyanto, 2002:43). Model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Pan dan Kosicki dimana model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai

pusat organisasi ide. *Frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan (Sobur, 2004 : 175).

Obyek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai Pemberitaan soal aksi #2019gantipresiden pada SKH Suara Merdeka, SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Republika Periode 4 – 6 September 2018. Periode ini dipilih karena dalam kurun waktu tersebut masalah tersebut hangat di perbincangan di berbagai media baik cetak maupun elektronik.

Tabel 1

Berita Edisi 4/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1	Gerakan Tagar Capres Diatur		Polri Terbitkan Arahan Deklarasi

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 2

Berita Edisi 6/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1		Gerak Jalan 'Neno' Di Solo	

Sumber: Olahan Peneliti

PEMBAHASAN

Berita yang digunakan dalam sajian data penelitian kali ini merupakan berita yang telah dipilih penulis pada saat pemberitaan terkait aksi gerakan #2019gantipresiden menjadi bahan pembicaraan di beberapa surat kabar nasional maupun lokal, seperti surat kabar Suara Merdeka, surat kabar Kedaulatan Rakyat dan surat kabar Republika. Analisis *framing* yang dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana realitas yang akhirnya didapatkan oleh khalayak dari hasil pembedaan pemberitaan yang dibuat oleh ketiga surat kabar tersebut terkait gerakan #2019gantipresiden baik dari pemilihan bahasa dan unsur lainnya yang memperkuat bingkai tersebut.

A. Analisis Framing Surat Kabar Harian Suara Merdeka

1. *Frame* : Gerakan Tagar Menimbulkan Konflik Horizontal dan Harus Diatur *Headline* : Gerakan Tagar Capres Diatur

Tanggal Terbit : 4 September 2018

Struktur Sintaksis

Lead

Polri mengeluarkan surat perintah untuk jajaran soal pemberian izin acara gerakan tanda pagar (tagar) dukungan capres.

Latar Informasi

“Jadi keinginan apa pun itu adalah berdasar UU No 9 tahun 1998. UU untuk menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dilindungi UU. Namun pada pasal 6, ada beberapa poin yang harus dipedomani. Pertama dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkawajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain,” tandas Kadiv Humas Mabes Polri Setyo di Jakarta

Kutipan, Sumber, Pernyataan

“Silahkan kalau tidak ada penolakan. Di situ ada penolakan kami melakukan penilaian ini boleh atau tidak. Kalau tidak boleh maka kami akan menyarankan tidak boleh. Kalau bubar sendiri Alhamdulillah. Kalau nggak mau bubar, kamu bubarkan. Kalau masyarakat menerima, tidak masalah. Kalau masyarakat mempermasalahkannya, itu bahaya dan bakal timbul kerusuhan,” jelas setyo.

Penutup

“Saya setuju. Semua kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan norma yang berlaku, dan berpotensi merusak hubungan sosial yang ada, dibubarkan saja,” kata Taufiqulhadi.

Frame kali berkaitan dengan bagaimana tanda pagar (tagar) terkait dukungan terhadap capres yang akan memiliki aturan yang berlaku sehingga ketidaknyaman yang dirasakan oleh masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari gerakan tagar tersebut bisa dihindari. Fokus *frame* pada berita di atas lebih kepada bagaimana aturan yang berlaku di dalam setiap tagar pendukung capres. *headline* tersebut memberikan gambaran soal bagaimana gerakan tagar untuk mendukung masing-masing capres akan segera memiliki aturan yang berlaku. Aturan tersebut sebagai solusi agar ketidaknyaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap segala sesuatu yang mungkin ditimbulkan oleh gerakan tagar capres tersebut dapat dihindari. Akan tetapi secara langsung *headline* tersebut ingin menekankan bahwa gerakan tagar memiliki dampak yang kurang baik hingga akhirnya perlu adanya aturan yang mengatur hal tersebut.

Skrip, pada berita ini yang ditonjolkan adalah unsur *what*, *who* dan *how*. Struktur skrip lebih menekankan pada pernyataan yang menjelaskan aturan di dalam UU tentang bagaimana aturan tersebut mengatur jalannya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat seperti gerakan tagar pendukung capres. Pernyataan tersebut pun disampaikan oleh pihak yang berkaitan secara langsung terhadap aturan yang berlaku tersebut yaitu pihak Polri dan hal tersebut menjadi sebuah penekanan terhadap isi berita yang disampaikan. Dijelaskan pula tentang bagaimana aturan tersebut berlaku dan seperti apa konsekuensi yang diambil apabila gerakan tagar tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Retoris, *frame* yang terdapat dalam berita ini adalah leksikon. Pada berita Suara Merdeka edisi 4 September 2018 leksikon ditampilkan pada kalimat “Dalam surat telegram yang beredar, munculnya gerakan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Hal itu berpotensi

menimbulkan **konflik horizontal** antar pendukung capres-cawapres di tengah masyarakat”.

Konflik horizontal merupakan sebuah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara, dan konflik yang dimaksud dalam kalimat di atas adalah konflik yang terjadi antar pendukung masing-masing capres yang akhirnya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

B. Analisis Framing Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

1. *Frame* : Penolakan Terhadap Gerakan #2019gantipresiden di Solo

***Headline* : Polda Jateng Tak Beri Izin Gerak Jalan ‘Neno’ di Solo**

Tanggal Terbit : 6 September 2018

Struktur Sintaksis

Lead
Rencana gerak jalan sehat yang akan menghadirkan para pengusung #2019gantipresiden, seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Minggu (9/9) di Lapangan Kota Barat Solo tidak mendapatkan izin dari Polda Jateng
Latar Informasi
Hal itu ditegaskan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Rabu (5/9) kepada wartawan di Kantor Direktorat Kriminal Khusus, Jalan Sukun Semarang. Menurut Kapolda, tidak dikeluarkannya izin itu dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Di antaranya, karena selain gerak jalan yang merupakan keramaian umum bersifat hiburan, olahraga dan kebudayaan yang oleh panitia akan diisi orasi politik dan secara kebetulan lapangan tersebut pada hari yang sama dilangsungkan kegiatan Pekan Olahraga warga Solo (Porwaso) sebagai bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas).
Kutipan, Sumber, Pernyataan
“Saya sudah menerima surat dari Walikota Solo terkait dengan digelarnya kegiatan Haornas di Lapangan Barat Solo,”. jelas Kapolda sambil menyinggung pihaknya telah mengirimkan surat kepada panitia jalan sehat. Adapun isinya kegiatan itu tidak diberikan izin dengan alasan kamtibmas.
Penutup
Menurut Kapolda pada acara Haornas nanti dihadirkan para pahlawan Asian Games peroleh medali emas berasal dari daerah Jawa Tengah. Apabila pihak panitia, meski tidak mengantongi izin, tetap menggelar gerak jalan menghadirkan artis Neno Warisman dan Ahmad Dhani, pihaknya akan bertindak tegas membubarkannya.

Frame dalam berita kali ini adalah bagaimana gerakan #2019gantipresiden mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti Polda Jateng dan elemen masyarakat lainnya, hal tersebut

dilakukan karena gerakan #2019gantipresiden bisa mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban yang ada selain itu juga adanya gerakan tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra. Awal dari kegiatan yang diadakan adalah jalan sehat untuk memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Lapangan Barat Solo, akan tetapi gerak jalan tersebut sarat akan muatan politik yaitu gerakan #2019gantipresiden itu sendiri. *headline* kali ini memberikan detail tentang siapa yang menolak kegiatan tersebut yaitu Polda Jateng dan adanya penekanan terhadap kalimat setelah gerak jalan yaitu ‘Neno’, hal tersebut secara tidak langsung menyiratkan bahwa kegiatan gerak jalan sarat akan muatan politik karena judul yang digunakan terdapat nama tokoh yang berkaitan dengan gerakan #2019gantipresiden yaitu Neno Warisman. Di dalam isi beritanya kegiatan gerak jalan tersebut selain dihadiri oleh Neno Warisman juga dihadiri oleh pengusung gerakan #2019gantipresiden lainnya yaitu Ahmad Dhani.

Terdapat unsur detail dalam tema yang dimuat, berkaitan dengan alasan kenapa penolakan tersebut dilakukan dan penjelasan soal bagaimana proses penolakan terhadap gerak jalan sehat tersebut.

Berikut kalimatnya:

Menurut Kapolda, tidak dikeluarkannya izin itu dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Di antaranya, karena selain gerak jalan yang merupakan keramaian umum bersifat hiburan, olahraga dan kebudayaan yang oleh panitia akan diisi orasi politik dan secara kebetulan lapangan tersebut pada hari yang sama dilangsungkan kegiatan Pekan Olahraga Warga Solo (Porwaso) sebagai bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) (6 September 2018)

“Saya sudah menerima surat dari Walikota Solo terkait dengan digelarnya kegiatan Haornas di Lapangan Barat Solo”, jelas Kapolda sambil menyinggung pihaknya

telah mengirimkan surat kepada panitia jalan sehat. Adapun isinya kegiatan itu tidak diberikan izin dengan alasan kamtibmas (6 September 2018).

Isi berita di atas menjadi sebuah penjelasan secara detail terhadap topik yang disampaikan oleh Kedaulatan Rakyat edisi 6 September 2018 yang tentunya berkaitan dengan penolakan gerak jalan sehat di Solo.

C. Analisis Framing Surat Kabar Harian Republika

- 1. *Frame* : Gerakan #2019gantipresiden Harus Sesuai Aturan**
***Headline* : Polri Terbitkan Arahan Deklarasi Polri Menilai Tiga Tagar Sebagai Kegiatan Politik**

Tanggal Terbit : 4 September 2018

Struktur Sintaksis

Lead

Polri menerbitkan arahan kepada jajaran anggota intelijen dan keamanan di kepolisian satuan wilayah tingkat daerah atau kepolisian daerah (polda) untuk menyikapi sejumlah aksi deklarasi dalam bentuk tagar dalam bentuk tagar calon presiden (capres). Arahan itu diterbitkan dalam bentuk surat telegram bernomor SRT/1852/VIII/2018 dan ditandatangani Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisararis Jendral Lutfi Lubihanto.

Latar Informasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, kegiatan menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa memang diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam Pasal 6 berapa poin harus dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi. Setyo menegaskan, jika salah satu dari lima hal tak terpenuhi, aparat kepolisian berhak untuk membubarkan penyampaian pendapat aspirasi. "Polisi menganggap kalau salah satu tidak terpenuhi bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban," ujarnya, Senin (3/8).

Kutipan, Sumber, Pernyataan

1. Dalam penilaian suatu penyampaian aspirasi dan pendapat, Setyo menuturkan, Polri melihat apakah rentan terjadi konflik atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi, polisi bisa mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 15, yang isinya adalah Polri dapat membubarkan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. "Kalau tidak mau dibubarkan, dia dikenakan UU pidana Pasal 211 sampai 218," ujarnya.
 2. Setyo menegaskan, Polri bersikap netral dan tak mendukung salah satu gerakan mendukung capres. Ia mengklaim, Polri hanya melihat jangan sampai deklarasi tagar
-

dukungan menjadi pemicu konflik. Ia pun menuturkan, Polri tidak akan masalah jika salah satu gerakan dukungan capres tidak mendapat penolakan di suatu daerah.

Penutup

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat dijamin di negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan, kebebasan tersebut tetap ada aturannya.

Frame yang terdapat dalam kedua berita tersebut adalah bagaimana gerakan #2019gantipresiden harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga adanya kemungkinan dampak yang buruk seperti terganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat perihal tidak diberlakukannya aturan tersebut dengan baik. *Headlie* pada edisi 4 September 2018 yang berjudul “Polri Terbitkan Arahan Deklarasi” juga menunjukkan bagaimana pihak Polri berperan dalam memberikan aturan terhadap kegiatan deklarasi. Adanya sub judul “Polri menilai tiga tagar sebagai kegiatan politik” semakin memberikan penegasan terhadap judul *headline* yang ditampilkan sebelumnya. Polri seakan telah mengambil keputusan terhadap kegiatan tagar yang ada dengan menyampaikan bahwa ketiga tagar yang dimaksud oleh pihak Polri merupakan kegiatan politik.

Tematik, terdapat unsur detail yang dimuat dalam edisi kali untuk menguatkan tema yang diambil Republika yang berisi tentang bagaimana aturan yang digunakan untuk mengatur aksi deklarasi dalam bentuk tagar pendukung capres. Berikut kalimatnya:

Lima hal itu, pertama, dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Kelima, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Retoris dalam edisi kali ini terlihat dari penggunaan kata '**mengklaim**' dalam memberikan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polri yang berkaitan dengan himbauan terhadap aksi deklarasi #2019gantipresiden yang diharapkan tidak menjadi pemicu terjadinya konflik. Republika kali memberikan informasi seakan bahwa pernyataan yang disampaikannya oleh pihak Polri merupakan fakta yang jelas terjadi dengan penggunaan kata mengklaim tersebut.

KESIMPULAN

1. *Frame* berita yang dihadirkan oleh surat kabar harian Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan Republika memiliki persamaan mengenai pemberitaan gerakan #2019gantipresiden, dimana ketiga surat kabar tersebut seakan tidak memihak kepada gerakan #2019gantipresiden. Dalam pemberitaannya, Suara Merdeka terkesan ingin memberikan citra negatif terhadap gerakan #2019gantipresiden dengan memberikan pemberitaan-pemberitaan yang seakan merugikan gerakan #2019gantipresiden, terlihat dari beberapa beritanya dimana sudut pandang yang digunakan lebih kepada sisi dampak negatif seperti konflik horizontal yang terjadi karena adanya gerakan #2019gantipresiden.

DAFTAR PUSTAKA

Baran, Stanley J. dan Dennis K.Davis. (2014). *Teori Komunikasi Massa, Dasar, Pergolakan, dan*

Masa Depan. Jakarta: Salemba Humanika

Biagi, Shirley.(2010). *Media/Impact, Pengantar Media Massa, Edisi 9*. Jakarta: Salemba

Humanika

Bungin, Burhan. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2016). *Jurnalistik, Teori & Praktik,*

Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Wazis, Kun. (2012). *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing